



KUNJUNGAN PRESIDEN HOLLANDE DAN PENGUATAN HUBUNGAN INDONESIA-PERANCIS

Simela Victor Muhamad*)

Abstrak

Pada akhir Maret 2017, setelah lebih dari 30 tahun, Presiden Perancis kembali mengunjungi Indonesia. Dalam pertemuan antarpemimpin kedua negara, Presiden Francois Hollande dan Presiden Joko Widodo sepakat meningkatkan kerja sama bilateral, terutama dalam bidang-bidang yang disepakati dalam Memorandum of Understanding (MoU) dan isu maritim yang menjadi perhatian kedua negara. Kunjungan Presiden Hollande dapat dimaknai sebagai bagian dari implementasi kemitraan strategis Indonesia-Perancis yang telah dideklarasikan pada tahun 2011. Tulisan ini membahas kunjungan Presiden Hollande ke Indonesia dan kaitannya dengan penguatan hubungan Indonesia-Perancis. Kunjungan Presiden Hollande ke Indonesia dan berbagai kesepakatan yang dicapai oleh kedua negara perlu ditindaklanjuti melalui program kerja sama lebih lanjut sesuai dengan bidang kerja samanya. Kerja sama antarparlemen juga perlu dimanfaatkan oleh kedua negara untuk mendukung upaya penguatan hubungan bilateral Indonesia-Perancis.

Pendahuluan

Hubungan Indonesia-Perancis akhir-akhir ini menarik untuk dicermati, terutama setelah media nasional memberitakan kunjungan kenegaraan Presiden Perancis Francois Hollande ke Indonesia pada 28-29 Maret 2017 lalu, karena setelah lebih dari 30 tahun, baru kali ini Presiden Perancis mengunjungi Indonesia kembali. Bahkan, Presiden Joko Widodo menyebutnya sebagai kunjungan bersejarah, mengingat kunjungan terakhir Presiden Perancis ke Indonesia adalah pada tahun 1986 saat negara itu dipimpin

Francois Mitterand. Dalam kunjungannya ke Indonesia kali ini, sebagai bagian dari lawatannya ke negara-negara Asia Tenggara (sebelumnya ke Singapura dan Malaysia), Presiden Perancis membawa sejumlah menteri dan beberapa anggota parlemen, serta sekitar 40 pemimpin bisnis. Hal tersebut menunjukkan kesungguhan Perancis di bawah kepemimpinan Presiden Hollande yang ingin memperkuat hubungan bilateralnya dengan Indonesia. Sebaliknya, bagi Indonesia, kunjungan Presiden Hollande memiliki arti

*) Peneliti Madya Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Email: victorsimela@yahoo.co.id



penting, karena Perancis merupakan salah satu mitra strategis Indonesia di Eropa.

Tulisan singkat ini mencoba membahas kunjungan Presiden Hollande ke Indonesia dan kaitannya dengan penguatan hubungan Indonesia-Perancis, khususnya dalam bidang-bidang kerja sama yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) dan kerja sama maritim yang mendapat perhatian besar kedua negara. Sebelum masuk pada pembahasan tersebut, terlebih dahulu diulas secara sekilas kemitraan strategis Indonesia-Perancis.

Kemitraan Strategis Indonesia Perancis

Kunjungan Presiden Francois Hollande ke Indonesia dapat dimaknai sebagai bagian dari implementasi kemitraan strategis Indonesia-Perancis yang telah diluncurkan pada tahun 2011, sekaligus untuk meneguhkan kembali pentingnya penguatan kerja sama bilateral. Pada saat peluncuran deklarasi kemitraan strategis tersebut, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Perancis menegaskan perlunya kedua negara membangun kerja sama yang saling menguntungkan, tidak saja dalam kerangka kepentingan hubungan bilateral tetapi juga dalam kerangka kepentingan global.

Dalam kerangka bilateral, kedua negara, sesuai dengan potensi masing-masing, sepakat untuk saling melengkapi satu sama lain dan melakukan berbagai upaya peningkatan kerja sama di berbagai bidang, baik yang terkait bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun bidang-bidang lainnya yang dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa kedua negara. Sedangkan untuk kepentingan global, Indonesia dan Perancis sepakat bekerja sama dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan internasional yang menjadi perhatian bersama, di antaranya isu terorisme, kejahatan lintas negara, perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan lainnya yang masih terjadi di berbagai kawasan dunia.

Kegiatan saling kunjung dan pertemuan antarpemimpin kedua negara menjadi bagian dari kemitraan strategis yang disepakati, karena melalui pertemuan antarpemimpin tersebut isu-isu strategis bilateral dan global dapat segera direspons bersama di tingkat paling tinggi. Pertemuan antarpemimpin kedua negara memang tidak selalu dapat dilakukan dalam kegiatan saling kunjung, dan

hal itu biasanya disiasati melalui kehadiran mereka dalam pertemuan atau forum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan forum negara-negara anggota G-20. Oleh karena itu, kehadiran Presiden Hollande di Indonesia menjadi momentum berharga bagi kedua negara untuk memperkuat kerja sama bilateral, dan hal ini merupakan bagian dari implementasi kemitraan strategis Indonesia-Perancis yang telah dideklarasikan enam tahun yang lalu (2011), dan kedua negara kini mencoba untuk mengisi dan memperkuatnya melalui komitmen kerja sama baru.

Kunjungan Presiden Hollande ke Indonesia sudah tentu tidak dapat dilepaskan dari adanya kepentingan Perancis di Asia, yakni untuk memperkuat jejaring dalam kerangka memperluas kepentingan ekonomi Perancis di kawasan Asia dan kepentingan strategis lainnya. Jika secara tradisional, kehadiran Perancis di Asia terefleksikan dalam kerja sama bilateralnya dengan Laos, Kamboja, dan Vietnam (tiga negara jajahannya di masa lalu), maka sejalan dengan kepentingan Perancis yang lebih luas, kerja sama tersebut perlu diperluas ke negara-negara Asia lainnya.

Kerja Sama Berdasarkan MoU

Kunjungan Presiden Perancis, Francois Hollande, ke Indonesia memiliki arti penting dan tidak dapat dipandang sebagai kunjungan biasa, karena melalui kunjungan ini, Perancis dan Indonesia meneguhkan kembali pentingnya penguatan kerja sama bilateral, di antaranya komitmen baru investasi pengusaha Perancis sekitar 2,6 miliar dolar AS. Penguatan kerja sama bilateral tersebut juga tercermin dari telah ditandatangani lima nota kesepahaman (MoU) oleh para menteri terkait dari kedua negara, meliputi kerja sama di bidang berikut: pembangunan kota berkelanjutan, pariwisata, pertahanan, ilmu pengetahuan dan penelitian, serta pertukaran tenaga peneliti.

Melalui kerja sama di bidang pembangunan kota berkelanjutan, Indonesia dan Perancis sebagai negara yang *concern* terhadap persoalan lingkungan hidup, berkepentingan menghadirkan kota hijau melalui program pengembangan kota hijau berkelanjutan. Melalui program ini, Perancis yang sudah lebih maju dalam mengembangkan kota hijau berkelanjutan telah menyatakan kesediaannya untuk berbagi pengalaman dan terlibat dalam berbagai proyek pembangunan

kota hijau di Indonesia, di antaranya melalui program kerja sama penataan ruang terbuka hijau, pengolahan limbah dan air bersih, *green building*, transportasi, dan sektor energi. Kerja sama bilateral ini sudah tentu tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk merespons persoalan perubahan iklim yang telah menjadi isu global dan sudah seharusnya menjadi perhatian dalam kerja sama Indonesia-Perancis.

Di bidang pariwisata, lingkup kerja sama meliputi penataan administrasi dan manajemen pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan produk, pemasaran pariwisata, kerja sama sektor swasta, dan teknologi industri pariwisata. Kerja sama pariwisata sangat relevan untuk diperkuat mengingat warga Perancis pada tahun 2016 menduduki peringkat kedua, setelah Inggris, untuk turis mancanegara yang masuk ke Indonesia. Data kantor Pariwisata Indonesia di Paris menunjukkan bahwa dari Januari sampai Oktober 2016 tercatat 22,20 persen wisatawan Perancis berkunjung ke Indonesia. Selain itu, menurut KBRI Paris, pariwisata Indonesia juga semakin dikenal di saluran-saluran televisi Perancis. Ini artinya ada potensi besar yang bisa digarap Indonesia untuk meningkatkan wisatawan dari Perancis, dan dalam kaitan ini Indonesia dan Perancis harus membangun kerja sama yang saling menguntungkan.

Di bidang pertahanan, Indonesia dan Perancis sepakat untuk memperdalam dan meningkatkan kerja sama dengan memperluas ruang lingkup dialog pertahanan Indonesia-Perancis dengan semangat saling menguntungkan dan kemitraan. Melalui kerja sama ini, kedua negara sepakat untuk memperluas ruang lingkup kerja sama dalam bidang pelatihan dan pendidikan serta latihan militer. Kedua negara juga sepakat meningkatkan dialog tentang keamanan maritim, seperti memerangi pembajakan, perompakan bersenjata di laut, dan penangkapan ikan ilegal. Selain itu, kedua negara juga sepakat meningkatkan kapasitas masing-masing dalam menjaga dan memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Terkait dengan kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian serta pertukaran tenaga peneliti, kedua negara memandang bahwa kerja sama ini memiliki nilai strategis dan dapat menjadi momentum bagi kebangkitan kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di antara

pendidikan tinggi Indonesia dan Perancis. Terkait hal ini, kedua negara sepakat untuk mengimplementasikan beberapa bentuk kerja sama, di antaranya: melakukan program penelitian dan inovasi ilmiah bersama; kunjungan dan pertukaran ilmuwan, peneliti, dan pakar dalam bidang tertentu; konferensi ilmiah, seminar, *workshop*, dan pameran iptek; serta pertukaran informasi tentang penelitian dan pengembangan inovatif.

Kerja Sama Maritim

Di luar kerja sama yang tertuang dalam MoU, kedua negara juga memandang penting untuk membicarakan kerja sama maritim. Dalam kerangka kerja sama maritim, kedua kepala negara menggarisbawahi pentingnya ruang udara dan zona maritim untuk dijaga bagi pergerakan ekonomi internasional dan menjadi tanggung jawab setiap negara yang memiliki batas teritorial untuk menjamin perdamaian dan keamanan. Bagi Perancis, hal ini bisa diartikan bahwa Indonesia harus memainkan peran penting dalam Poros Maritim Dunia, khususnya dalam menjaga stabilitas dan keamanan maritim di Asia di mana Perancis juga berkepentingan atas keamanan kawasan ini.

Untuk implementasi lebih jauh, kedua negara sepakat bekerja sama dalam memperkuat kapasitas angkatan laut. Terkait hal ini, Perancis menyatakan kesediaannya untuk turut serta memperkuat kemampuan TNI Angkatan Laut, termasuk menyediakan kapal selam yang dibutuhkan Indonesia. Kebutuhan armada laut Indonesia sebelumnya juga pernah didatangkan dari Perancis, seperti KRI Spica yang tiba pada Desember 2015, Kapal Hidrografi TNI Angkatan Laut yang digunakan untuk kegiatan survei di laut. Perancis sejauh ini juga dikenal sebagai negara yang memiliki kekuatan armada laut yang andal dan sejumlah negara di dunia telah menjadikannya sebagai referensi bagi pengembangan armada lautnya.

Kerja sama maritim Indonesia-Perancis juga menaruh perhatian pada upaya untuk mengawasi zona maritim masing-masing dan menegakkan kedaulatan atau yurisdiksi atas zona tersebut sesuai dengan hukum internasional. Dalam hal ini, Indonesia dan Perancis menegaskan keinginannya untuk memajukan kerja sama dalam upaya memerangi pembajakan di laut lepas, pemberantasan *Illegal, Unreported and*

Unregulated (IUU) Fishing, dan kejahatan terkait lainnya, termasuk perlindungan terhadap lingkungan laut. Perlindungan lingkungan laut tidak dapat dilepaskan dari pembangunan *blue economy* dan sudah seharusnya hal itu menjadi komitmen negara-negara di dunia. Dalam kerangka pembangunan *blue economy* itu pula, Indonesia dan Perancis sepakat untuk bekerja sama dalam penelitian dan inovasi, dengan mempromosikan penelitian ilmiah kelautan dengan mempertimbangkan pentingnya menjaga integritas keanekaragaman hayati dan memerangi pencurian keanekaragaman hayati.

Kerja sama maritim Indonesia-Perancis juga tidak mengabaikan aspek ekonomi. Dalam kaitan ini, kedua negara sepakat untuk mengembangkan kerja sama di bidang perikanan, transportasi dan logistik, pembuatan kapal, pelayanan kelautan dan pelabuhan, energi kelautan dan lepas pantai, dan pariwisata maritim. Khusus terkait energi kelautan dan untuk memastikan ketahanan energi masing-masing negara, Indonesia dan Perancis sepakat untuk memberikan perhatian pada proyek bersama dalam memanfaatkan sumber daya dan energi kelautan, di antaranya dengan mendorong penerapan teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan inovatif, khususnya di daerah terpencil.

Hal lainnya yang menjadi perhatian kedua negara, dan hal ini dapat juga diartikan sebagai bagian dari pengembangan kerja sama keamanan adalah penegasan kedua negara terhadap pentingnya menjaga keselamatan, keamanan, dan kebebasan navigasi dan penerbangan di semua lautan dan samudera, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Ini artinya, kedua negara tidak dapat mengabaikan dinamika keamanan maritim di kawasan (Asia Timur), khususnya terkait dengan situasi yang terjadi di Laut China Selatan. Dalam kerangka ini pula, Indonesia dan Perancis menyatakan dukungan terhadap upaya ASEAN dan China untuk mengimplementasikan secara penuh dan efektif Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (yang dikeluarkan tahun 2002) dan penyelesaian secepatnya Tata Perilaku di Laut China Selatan yang saat ini masih diproses ASEAN dan China.

Penutup

Kunjungan Presiden Hollande ke Indonesia, dengan berbagai kesepakatan yang dicapai oleh kedua negara, perlu

ditindaklanjuti melalui program kerja sama lebih lanjut sesuai dengan bidang kerja samanya. Kerja sama kedua negara tidak boleh berhenti hanya pada penandatanganan MoU dan pernyataan komitmen kerja sama, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan program kerja sama yang lebih konkret. Kemitraan strategis kedua negara akan memberi makna ketika berbagai kesepakatan yang dihasilkan tidak saja dapat diimplementasikan, tetapi juga membawa kemajuan bagi hubungan kedua negara.

Penguatan hubungan bilateral Indonesia-Perancis sudah tentu tidak hanya menjadi urusan pemerintah kedua negara, tetapi juga perlu melibatkan aktor hubungan internasional lainnya, termasuk parlemen, agar hubungan Indonesia-Perancis semakin kuat. Oleh karena itu, dapat dipahami jika dalam kunjungannya ke Indonesia, Presiden Hollande juga didampingi sejumlah anggota parlemen Perancis. Dalam kunjungannya ke DPR, para anggota parlemen Perancis menyampaikan harapan dan pandangannya agar hubungan Indonesia-Perancis terus diperkuat, dan parlemen kedua negara, melalui peningkatan kerja sama antarpemerintah, dapat menjadi bagian untuk mendukung upaya penguatan hubungan bilateral tersebut.

Referensi

- “France is Indonesia’s Strategic Partner in Economic Sector, Presiden Jokowi Says”, Setkab.go.id., 29 Maret 2017, <http://setkab.go.id/en/france-is-indonesias-strategic-partner-in-economic-sector-president-jokowi-says/>, diakses 3 April 2017.
- “Indonesia, France to boost economic ties”, *The Jakarta Post*, 3 April 2017, hlm. 10.
- “Jokowi Sebut Kunjungan Presiden Perancis Bersejarah”, Kompas.com., 29 Maret 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/29/13584051/jokowi.sebut.kunjungan.president.perancis.bersejarah>, diakses 30 Maret 2016.
- “Outgoing Hollande brings US\$2.6 b investment to Indonesia”, *The Jakarta Post*, 30 Maret 2017, hlm. 12.
- “Setelah 30 Tahun, Presiden Perancis Bakal Kunjungi Indonesia”, Kompas.com.m 23 Maret 2017, <http://internasional.kompas.com/read/2017/03/23/15125971/setelah.30.tahun.president.perancis.bakal.kunjungi.indonesia>, diakses 29 Maret 2017.